

**DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 12/G/2023/PTUN-BKL DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH:

WIDIA NOVA SARI
2323760017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2025 M/1446 H**

DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR
12/G/2023/PTUN-BKL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2025 M/1446 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PROGRAM PASCASARJANA

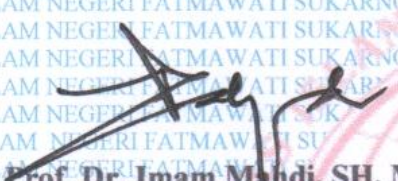
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

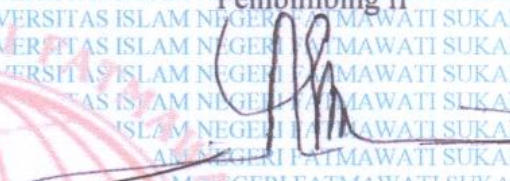
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I


Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II


Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
NIP. 196605251996031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 19740618 200901 1 004

Nama : **Widia Nova Sari**

NIM : **2323760017**

Tanggal Lahir : **14 November 1998**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
**“DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12/G/2023/PTUN-BKL DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”**

Penulis
WIDIA NOVA SARI
NIM. 2323760017

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal
15 September 2025.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Ismail Jalili, MA</u> (Ketua Penguji)	17/09 25	1.
2	<u>Dr. Adam Nasution, M.Pd.I</u> (Sekretaris)	17/09 2025	2.
3	<u>Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag</u> (Penguji Utama)	17/09 2025	3.
4	<u>Yosy Arisandi, Ph.D</u> (Penguji II)	17/09 2025	4.

Mengetahui,
Rektor UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 19620101 199403 1 005

Bengkulu, September 2025
Direktur PPs UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulisakan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisna ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 11 /09/ 2025
Yang Membuat Pernyataan



Widia Nova Sari
NIM. 2323760017

MOTTO

*"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan
Dan malam pun tidak dapat mendahului siang
Masing-Masing beredar pada garis edarnya"
(Qs. Yasin : 40).*

*"Hukum tanpa keadilan adalah kesia-siaan, keadilan tanpa hukum adalah kekacauan."
"Mendidik pikiran membuatmu pintar, tapi mendidik hati, itulah yang membuatmu benar-
benar manusia."
(Aristoteles)*

*"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tau kapan kau
mencapai tuju dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu."
Angan-angan yang dulu mimpi belaka,
Kita gapai segala yang tak disangka"
(Baskara Putra-Hindia)*

*Learning to accept what is not yet destiny for today, because it develops better, while
cultivating the existing process, is not a real blessing and success that learning and knowing
something is a true gift.
(Widia Nova Sari)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar, serta tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Tesis ini adalah persembahan kecil saya untuk Kedua orang tua, Bapak saya Gunardi dan Ibu saya Nurasarnelis yang selalu menjaga, mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan baik serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu dan terimakasih atas semua cinta yang telah mama berikan untuk saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri sendiri,terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Saudara kandungku, Wiwik Arvolis, Witri Meilandari, Muhammad Yusuf, yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Kepada Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Dr. Ismail Jalili, MA, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Untuk Pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana bapak Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan Dr. Abdul Hafiz, M. Ag yang telah

membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan tesis ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

5. To someone, best friends, soulmates whose presence is no less important, thank you for being supportive and giving prayers in all good things and believing and having faith in me.
6. Untuk semua keluarga besarku yang tidak bisa disebut satu persatu terimakasih selalu mendukung dan memberi dorongan agar selalu focus agar bisa menyelesaikan kuliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan s2 ini.
7. Teman-teman seperjuanganku Pascasarjana Hukum Tata Negara kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting , for just being me at all times.
9. "Gratias mihi: glorior te. Pugna haec finita est, sed iter longum restat; pergamus vincere iterum. Cantica Baskarae Putrae me in proelio comitata sunt."

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul
**“Diskresi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Pemberhentian
Perangkat Desa: Analisis Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dalam
Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.”**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah
berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat
petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi
Hukum Tata Negara/Siyasah pada Program Pascasarjana di Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu,
Penulis

2025

Widia Nova Sari
NIM. 2323760017

ABSTRAK

DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12/G/2023/PTUN-BKL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

Penulis:

Widia Nova Sari
NIM. 2323760017

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH
2. Dr. Abdul Hafiz, M. Ag

Rumusan masalah dalam tesis ini mencakup: (1) Bagaimana penerapan diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL? (2) Bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyyah dalam menilai diskresi hakim dalam perkara tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan analisis Siyasah Qadhaiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL mencerminkan sikap hakim yang aktif, progresif, dan proporsional. Hakim tidak hanya membatalkan SK Kepala Desa Meok Nomor 18 Tahun 2022, tetapi juga memerintahkan penerbitan SK pemberhentian baru sesuai status penggugat sebagai Pelaksana Tugas (PLT), serta tetap mengesahkan SK pengangkatan perangkat desa yang baru. Amar ultra petita ini dibenarkan secara yuridis karena sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta asas *dominus litis*, untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga stabilitas pemerintahan desa, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak para pihak. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, diskresi hakim dipandang sebagai bentuk *ijtihad* hukum yang berlandaskan nilai kemaslahatan dan keadilan, meski tidak sepenuhnya identik dengan *ijtihad al-qāḍī* klasik. Putusan ultra petita ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan mencegah kemudharatan, menegakkan keadilan, mengisi kekosongan norma, dan menjamin kelangsungan pelayanan publik di desa. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya diskresi hakim sebagai instrument dalam mewujudkan fungsi yudikatif, menunjukkan adanya sinergi antara prinsip negara hukum modern dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Diskresi Hakim, Pemberhentian Perangkat Desa, Siyasah Qadhaiyyah

JUDICIAL DISCRETION IN RESOLVING VILLAGE APPARATUS
DISMISSAL DISPUTES: ANALYSIS OF DECISION NUMBER
12/G/2023/PTUN-BKL FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH
QADHAIYYAH

Author:

Widia Nova Sari
Student ID. 2323760017

Supervisors:

1. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH
2. Dr. Abdul Hafiz, M. Ag

The formulation of the problems in this thesis includes: (1) How is judicial discretion applied in resolving village apparatus dismissal disputes based on Decision Number 12/G/2023/PTUN-BKL? (2) How does the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah* evaluate judicial discretion in this case? This research employs normative legal methods with statutory, case, comparative, and *Siyasah Qadhaiyyah* approaches.

The findings show that the application of judicial discretion in Decision Number 12/G/2023/PTUN-BKL reflects an active, progressive, and proportional judicial attitude. The judges not only annulled Village Head Decree No. 18 of 2022 but also ordered the issuance of a new dismissal decree in accordance with the plaintiff's status as Acting Official (PLT), while upholding the validity of the new appointment decree for village apparatus. This *ultra petita* ruling is legally justified under Article 10(1) and Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, as well as the principle of *dominus litis*, to fill the legal vacuum, maintain village governance stability, ensure legal certainty, and protect the parties' rights.

From the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah*, judicial discretion is seen as a form of legal *ijtihad* based on values of justice and public interest, though not entirely identical to classical *ijtihād al-qāḍī*. The *ultra petita* decision aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), as it aims to prevent harm, uphold justice, fill normative gaps, and guarantee the continuity of public services in the village. This research highlights the importance of judicial discretion as an instrument in realizing judicial functions, showing the synergy between modern rule of law principles and the values of justice in Islamic law.

Keywords: Judicial Discretion, Village Apparatus Dismissal, *Siyasah Qadhaiyyah*

الخلاصة

G/2023/PTUN-BKL/السلطة التقديرية للقاضي في حل نزاعات فصل موظفي القرية: تحليل الحكم رقم 12
من منظور السياسة القضائية

الباحثة:

وديا نوبا ساري

رقم التسجيل: 2323760017

المشرفان:

1. الأستاذ الدكتور إمام مهدي، ليسانس في الحقوق، ماجستير في القانون
2. الدكتور عبد الحفيظ، ماجستير في الشريعة

تتضمن إشكالية هذه الرسالة: (1) كيف يتم تطبيق السلطة التقديرية للقاضي في حل نزاعات فصل موظفي القرية بناءً على (السياسة القضائية الإسلامية) ؟ (2) كيف ينظر منظور السياسة القضائية G/2023/PTUN-BKL/الحكم رقم 12 إلى هذه السلطة في القضية؟ اعتمد البحث على المنهج القانوني المعياري باستخدام مناهج التشريع، الحالة، المقارنة، والتحليل السياسي القضائي.

يعكس موقفًا قضائيًا نشطًا G/2023/PTUN-BKL/أظهرت النتائج أن تطبيق السلطة التقديرية في الحكم رقم 12 وتقدميًا ومتناسبًا. فلم يكتفِ القاضي بإلغاء قرار رئيس قرية "ميوك" رقم 18 لسنة 2022، بل أمر أيضًا بإصدار قرار فصل ، مع إبقاء قرار تعيين الموظفين الجدد في مناصبهم صحيحًا (PLT) جديد يتوافق مع وضع المدعي كمكلف بالعمل ونافذًا. ويُعدّ هذا الحكم "فوق المطلوب" مبررًا قانونيًا استنادًا إلى المادة 10 الفقرة (1) والمادة 5 الفقرة (1) من القانون ، وذلك لسدّ الفراغ القانوني، وضمان *dominus litis* رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية، إضافة إلى مبدأ استقرار إدارة القرية، وتحقيق اليقين القانوني، وحماية حقوق الأطراف.

ومن منظور السياسة القضائية، تُعتبر هذه السلطة شكلاً من أشكال الاجتهاد القانوني القائم على قيم العدالة والمصلحة، الكلاسيكي. كما أن الحكم "فوق المطلوب" يتوافق مع (الاجتهاد القضائي) وإن لم تكن مطابقة تمامًا لاجتهاد القاضي مقاصد الشريعة الإسلامية لأنه يهدف إلى دفع المفساد، تحقيق العدالة، سدّ الثغرات التشريعية، وضمان استمرار الخدمة العامة في القرية. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية السلطة التقديرية للقاضي كأداة لتحقيق الوظائف القضائية، مما يُظهر التكامل بين مبادئ دولة القانون الحديثة وقيم العدالة في الشريعة الإسلامية.

السلطة التقديرية للقاضي، فصل موظفي القرية، السياسة القضائية: الكلمات المفتاحية

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
الخلاصة.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Teori Putusan Hakim.....	26
B. Diskresi Hakim.....	33
C. Siyasah Qadhaiyyah	57
BAB III DISKRESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SIYÂSAH QADHÂ'IYYAH	65
A. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Hakim	65

B. Independensi Hakim.....	68
C. Dasar Hukum Peradilan Islam (<i>Siyāsah qadhā’iyyah</i>).....	70
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam <i>Siyāsah Qadhā’iyyah</i>	75
E. Diskresi Hakim dan Ijtihad al-Qadhi	78
BAB IV PEMBAHASAN.....	83
A. Analisis Penerapan Diskresi Hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN BKL terkait Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa	83
1. Kronologi dan Objek Sengketa	84
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	87
3. Diskresi Hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL	93
4. Perbandingan Diskresi Hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN- BKL dengan Putusan Sejenis	100
5. Implikasi Teoretis dan Praktis dari Diskresi Hakim.....	111
B. Perspektif <i>Siyāsah Qadhā’iyyah</i> terhadap Diskresi Hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL.....	113
1. Prinsip Keadilan (<i>al-‘Adālah</i>).....	114
2. Prinsip Kemaslahatan (<i>al-Maṣlaḥah</i>)	117
3. Prinsip Kepastian Hukum (<i>al-Yaqīn</i>)	120
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128